

BAB II

PROFIL MEDIA DAN KRONOLOGI KASUS

A. SKH Republika

1. Sejarah SKH Republika

Surat Kabar Harian Republika diterbitkan berdasarkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dari Departemen Penerangan Republik Indonesia nomor 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992 tanggal 19 Desember 1992. SKH Republika diterbitkan di bawah PT Abdi Bangsa yang didirikan pada 28 November 1992 di Jakarta. Perusahaan ini merupakan bidang usaha penerbitan dan percetakan pers yang berada dibawah Yayasan Abdi Bangsa. Pendiri Yayasan Abdi Bangsa berjumlah 48 orang yang terdiri dari beberapa menteri, pejabat tinggi negara, cendekiawan, tokoh masyarakat, serta pengusaha. Mereka antara lain Ir. Drs. Ginanjar Kartasasmita, H. Harmoko, Ibnu Sutowo, Muhammad Hasan, Ibu Tien Soeharto, Probosutedjo, Ir. Aburizal Bakrie, dan lain-lain. Sedangkan Presiden Soeharto berperan sebagai pelindung yayasan. Prof. Dr. Ing, B.J. Habibie yang menjabat sebagai ketua ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim di Indonesia) dipercaya pula untuk menjadi Ketua Badan Pembina Yayasan Abdi Bangsa.

Ikatan Cendekiawan Muslim di Indonesia (ICMI) dibentuk pada 5 Desember 1990. Salah satu program ICMI yang disebarkan ke seluruh Indonesia, antara lain, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program

peningkatan 5K, yaitu kualitas iman, kualitas hidup, kualitas kerja, kualitas karya, dan kualitas pilar. Untuk mewujudkan tujuan, cita-cita dan program ICMI di atas, maka beberapa tokoh pemerintah, dan masyarakat yang berdedikasi dan berkomitmen pada pembangunan bangsa dan masyarakat Indonesia, yang beragama Islam, membentuk Yayasan Abdi Bangsa pada 17 Agustus 1992, tiga program utamanya adalah pengembangan *Islamic Centre*, Pengembangan CIDES (*Center for Information and Development Studies*), dan Penerbitan Surat Kabar Harian Republika.

Harian Republika sesungguhnya lahir sebagai respons atas kurangnya surat kabar berbasis Islam di Indonesia. Ada semacam kesadaran historis intelektual muslim bahwa realitas pembaca surat kabar Indonesia 80% adalah pembaca muslim. Kesadaran inilah yang kemudian membuahkan seminar intelektual muslim, jurnalis dan editor pada tahun 1991. Seminar ini disponsori oleh ICMI. Nama Republika sendiri diusulkan oleh Presiden Soeharto, yang sebelumnya akan diberi nama Republik.

Dalam tubuh Republika muncul tokoh-tokoh muslim dari berbagai latar belakang. Ada intelektual, ada birokrat, jurnalis senior dan konglomerat. Pada level jabatan eksklusif misalnya tercantum nama Adi Sasono (Konglomerat). Dari kalangan intelektual tercantum nama seperti Nurcholis Madjid, Amien Rais dan Edy Sesdyawati. Pada level profesional (staf redaksi) tercantum nama Parni Hadi. Disekitar Parni

Hadi ada juga Nasir Tamara, Sinansari Ecip. Pada level management, terlibat barisan konglomerat seperti Tanri Abeng yang saat itu menjabat sebagai direktur eksekutif Bakrie Brothers.

2. Visi dan Misi SKH Republika

Motto SKH Republika yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” menunjukkan semangat mempersiapkan masyarakat memasuki era baru. Keterbukaan dan perubahan telah dimulai dan tak ada langkah kembali, bila memang sepakat untuk mencapai kemajuan. Meski demikian, mengupayakan perubahan yang juga berarti pembaharuan tidak mesti harus mengganggu stabilitas yang telah susah payah dibangun.

Republika juga memiliki visi dan misi yang dijadikan acuan dalam setiap menggali dan mengungkap berita untuk disampaikan kepada masyarakat. visi dan misi tersebut adalah:

a. Visi SKH Republika

Sikap umum atau visi yang dimiliki Republika sebagai landasan penerbitannya adalah:

- 1) Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.
- 2) Membela, melindungi dan melayani kepnetingan umat.
- 3) Mengkritisi tanpa menyakiti
- 4) Mencerdaskan, menyelidiki, dan mencerahkan.
- 5) Berwawasan kebangsaan.

b. Misi SKH Republika

Dengan latar belakang tersebut, misi Republika di berbagai kehidupan adalah sebagai berikut:

1) Bidang Politik

- a) Mengembangkan demokrasi;
- b) Optimalisasi peran lembaga-lembaga negara; mendorong partisipasi politik semua lapisan masyarakat;
- c) Mendorong partisipasi politik semua lapisan masyarakat;
- d) Penghargaan terhadap hak-hak sipil.

2) Bidang Ekonomi

- a) Mendukung keterbukaan dan demokrasi ekonomi menjadi kepedulian Republika;
- b) Mempromosikan profesionalisme yang mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan dalam manajemen;
- c) Berpihak pada kepentingan ekonomi domestik dari pengaruh globalisasi;
- d) Pemerataan sumber-sumber daya ekonomi;
- e) Mempromosikan etika dan moral dalam berbisnis;
- f) Mengembangkan ekonomi syari'ah
- g) Berpihak pada usaha menengah, kecil, mikro, dan koperasi (UMKMK).

3) Bidang Budaya

- a) Mendukung sikap terhadap bentuk-bentuk ekspresi kreatif budaya yang berkembang di masyarakat;
- b) Mengembangkan bentuk-bentuk kesenian dan hiburan yang sehat, mencerdaskan, menghaluskan perasaan, dan mempertajam kepekaan nurani;
- c) Menolak bentuk-bentuk kebudayaan/kesenian yang merusak moral, akidah, dan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan.

4) Bidang Agama

- a) Mendorong sikap beragama yang terbuka sekaligus kritis terhadap realitas sosial-ekonomi kontemporer;
- b) Mempromosikan semangat toleransi yang tulus;
- c) Mengembangkan penafsiran ajaran-ajaran ideal agama dalam rangka mendapatkan pemahaman yang segar dan tajam;
- d) Mendorong pencarian titik temu di antara agama-agama.

5) Bidang Hukum

- a) Mendorong terwujudnya masyarakat sadar hukum;
- b) Menjunjung tinggi supremasi hukum;
- c) Mengembangkan mekanisme *checks and balances* pemerintah masyarakat;

- d) Menjunjung tinggi HAM
- e) Mendorong pemberantasan KKN secara tuntas.

3. Struktur Organisasi SKH Republika

Berdasarkan data *company profile* SKH Republika, berikut adalah susunan redaksi SKH Republika:

Tabel 1. Struktur Organisasi Surat Kabar Harian Republika

No.	Jabatan	Nama
1	Pemimpi Redaksi	Nasihin Masha
2	Wakil Pemimpin Redaksi	Irfan Junaidi
3	Redaktur Pelaksana Koran	Subroto
4	Kepala Desain	Sarjono
5	Kepala Infografis	Muhammad Ali Imron
6	Kepala Bahasa	Abdul Sahal
7	Direktur Utama	Erick Tohir
8	Wakil Direktur Utama	Mira Rahardjo Djarot
9	Direktur Operasional	Arys Hilman Nugraha
10	Komisaris Utama	Adi Sasono
11	Komisaris	R. Harry Zunardy, Adrian Syarkawi, Rudi Setia Laksana
12	GM Keuangan	Didik Irianto
13	GM Marketing dan Sales	Yulianingsih Yani
14	Manager Iklan	Indra Wisnu
15	Manager produksi	Nurrokhim
16	Manager Sirkulasi	Haryadi B. Susanto
17	Manager Keuangan	Hery Setiawan

4. Kepemilikan dan Afiliasi SKH Republika

Republika sampai dengan tahun 2000 merupakan harian yang mendukung urusan agama Islam dan penganutnya, serta disponsori oleh pebisnis-pebisnis Islam yang berpengaruh. Habibie mengangkat pemimpin redaksi dan direktur perusahaan (yang kala itu dijabat sekaligus oleh satu orang). Republika memiliki tiras yang meningkat dengan cepat. Pada tahun 1995 Republika menjadi harian pertama Indonesia yang muncul di internet dan pada tahun 1997 mereka juga merupakan harian pertama yang melaksanakan sistem cetak jarak jauh. Karakter yang berpihak pada kepentingan umat Islam sepertinya lebih berperan penting daripada keadaan ekonomi harian Republika. Harian ini sejak berdirinya tidak pernah meraih laba. Paling tidak sampai hari ini Republika tetap bertahan, berbeda dengan sebagian besar media cetak Islam lainnya, yang karena buruknya manajemen mengalami kematian yang “perlahan-lahan dan menyakitkan” (Soekanto dalam Keller, 2009:84).

Dengan berakhirnya jabatan Habibie sebagai presiden dan berkurangnya pengaruh ICMI di panggung politik, Republika mulai mencari alternatif-alternatif. Tahun 2000 Erick Thohir dengan grup Mahaka membeli saham mayoritas. PT Abdi Bangsa kemudian menjadi perusahaan induk, dan Republika berada di bawah bendera PT Republika Media Mandiri, salah satu anak perusahaan PT Abdi Bangsa. Di bawah

bendera Mahaka Media, kelompok ini mempunyai anak perusahaan dengan berbagai bidang yang tertera pada tabel dibawah ini,

Tabel 2. Daftar Nama Anak Perusahaan Mahaka Media

BIDANG ANAK PERUSAHAAN		
Penerbitan dan Percetakan	Pemasaran/Event	Penyiaran
PT Republika Media Mandiri (Harian Republika)	PT Kalyanamitra Adhara Mahardhika (Alive Indonesia)	PT Danapati Abinaya Investama (Jak Tv)
PT Media Golfindo (Golf Digest Indonesia)	PT Wahana Kalyanamitra Mahardhika (CardPlus)	PT Republika Media Visual
PT Pustaka Abdi Bangsa (Republika Penerbit)	PT Gamma Investa Lestari (Gamma)	PT Mahaka Radio Integra Tbk (Jak FM, Gen FM, Gen FM Surabaya, Hot FM, Mustang FM, Most FM, dan Kis FM)
PT Emas Indonesia Duaribu (Harian Indonesia)		

Sumber:http://mahakamedia.com/upload/pdf_document/298e026b7b3262347e6e33b121e0e64d.pdf

Erick Thohir yang dengan kepemilikan saham mayoritasnya bertindak sebagai pemilik Republika, bukanlah seorang wartawan. Ia berasal dari keluarga pengusaha yang berpengaruh. Pada usia 24 tahun, ia mendirikan perusahaannya sendiri: Mahaka. Mahaka memiliki beberapa anak perusahaan yang aktif dalam pertambangan batu bara dan kapur atau yang berfungsi sebagai perusahaan dagang dan perusahaan yang bergerak di bidang properti. Sementara itu Republika merupakan bagian dari perusahaan holding Abdi Bangsa yang sudah masuk bursa saham. Di perusahaan ini, Erick Thohir juga menjabat sebagai direktur utama. Ia lalu menerapkan manajemen yang berorientasi laba pada harian yang

tadinya disubsidi ini. Sejak tahun 2000 terjadi beberapa kali gelombang rasionalisasi dan empat kali pergantian pimpinan redaksi (Keller, 2009:85).

Selain keterlibatan bisnis di dalam perusahaan-perusahaan miliknya, Erick memegang pula posisi di perusahaan-perusahaan milik keluarganya, misalnya sebagai wakil direktur utama perusahaan tambang batu bara PT Allied Indo Coal (Situs Asosiasi Pengusaha Tambang Batu Bara Indonesia, [http:// www.apbiicma.com](http://www.apbiicma.com) . Selain itu, kegiatannya di dunia olah raga sebagai ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) dan pemilik klub bola basket *Satria Muda Britama*.

Erick Thohir mengungkapkan, motivasinya untuk berinvestasi dalam bidang media adalah murni bisnis. Ia beranggapan, bahwa di masa depan aspek hiburan akan mendominasi isi media dan memegang peranan yang penting dalam bisnis media. “Tamasya” ke dunia politik ditolaknya dengan alasan kemungkinan munculnya konflik kepentingan di perusahaan yang dipimpinnya. Terkait dengan isi media, Erick ingin memajukan penampilan yang moderat dan penguatan tulisan-tulisan yang menghibur di hariannya (wawancara dengan Erick Thohir dalam Keller, 2009:85).

Di Republika tidak ada dewan redaksi yang dapat mewakili kepentingan redaksi. Dan serikat pekerja hanya mempunyai tuntutan sosial dan material. Hak berbicara, misalnya dalam dengar pendapat

sebelum pengangkatan pimpinan redaksi, tidak dimiliki oleh redaksi. Kepentingan-kepentingan ekonomi dari pemilik saham dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan-keputusan redaksional. Pemilik perusahaan tidak ada hak prerogatif untuk memaksakan apa saja yang harus dimuat. Namun tetap saja, ada hal-hal yang kadang-kadang berkaitan dengan kepentingan mereka. Hal itu dapat didiskusikan, apabila kepentingan tersebut tidak melanggar visi misi, tidak melanggar hukum, dan tidak melanggar keadilan. Secara resmi tidak ada “larangan menulis” tentang tema tema tertentu untuk para reporter. Namun, artikel yang dianggap tidak cocok untuk harian tersebut tidak dipilih untuk diterbitkan oleh redaktur yang memimpin. Swasensor digambarkan sebagai bagian dari hak veto pemilik untuk menghindari artikel-artikel yang dapat merugikan bisnis, namun juga dalam arti memberi prioritas kepentingan pemilik atau partner bisnisnya dalam berita (Keller, 2009:95).

B. KRONOLOGI KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok divonis hukuman dua tahun penjara atas kasus dugaan penistaan agama pada Selasa 9 Mei 2017. Kasus tersebut bermula dari peristiwa pada 27 September 2016, ketika Ahok berpidato saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Pidato pada saat itulah yang dianggap menghina agama.

Kunjungan kerja Ahok ke Kepulauan Seribu pada saat itu yaitu untuk membicarakan perihal program nelayan yang telah dilaksanakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok datang untuk meninjau program pemberdayaan budi daya kerapu. Menurutnya, program itu akan tetap dilanjutkan meski dia nanti tidak terpilih lagi menjadi gubernur di pilgub Februari 2017, sehingga warga tak harus memilihnya hanya semata-mata ingin program itu terus dilanjutkan (<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>, diakses pada 21 Oktober 2017). Pernyataan Ahok yang dianggap menistakan agama muncul dalam video berdurasi satu jam 48 menit 33 detik yang diunggah akun *youtube* pemprov DKI pada 28 September 2016. Awalnya tidak ada yang mempermasalahkan video tersebut hingga pada tanggal 6 Oktober 2017 barulah menjadi isu besar ketika Buni Yani mengunggah video rekaman di facebooknya dengan judual ‘Penistaan terhadap Agama?’ berdurasi 31 detik dari video asli berdurasi satu jam 48 menit 33 detik. Transkripsinya yaitu sebagai berikut “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, gak bisa pilih saya, ya – dibohongin pakai surat Al Maidah surat Ayat 51 macam-macam gitu lho. Itu hak bapak ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh *nggak* apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu”. Namun dalam video yang diunggah Buni, sudah di edit dengan menghilangkan kata “pakai” menjadi “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, *gak* bisa pilih saya, ya – dibohongin surat Al Maidah surat Ayat 51 macam-

macam gitu lho. Itu hak bapak ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh *nggak* apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu”. Setelah munculnya video tersebut, tak lama kemudian Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Selatan melaporkan Ahok kepada polisi. Hingga November 2016 tercatat sebanyak 14 laporan kepada polisi oleh sejumlah Ormas.

Pada 10 Oktober 2016, Ahok meminta maaf kepada Umat Islam terkait ucapannya soal surat Al Maidah ayat 51. 14 Oktober 2016, ribuan orang dari berbagai Ormas Islam berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Massa menuntut Ahok segera dihukum. Unjuk rasa yang juga disebut dengan Aksi Bela Islam I tersebut sempat berlangsung ricuh. Pada 24 Oktober 2016, atas inisiatif sendiri Ahok mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi terkait ucapannya. Unjuk rasa kembali terjadi pada 4 November 2016, perkiraan jumlah massa unjuk rasa antara 75.000 hingga 100.000 orang melibatkan pendiri FPI, Rizieq Shihab dan sejumlah anggota DPR seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Aksi Bela Islam Jilid II ini mempunyai tuntutan yang sama dengan unjuk rasa sebelumnya yakni untut segera memproses hukum terhadap Ahok yang dinilai menodai agama terkait ucapannya mengenai surat Al Maidah ayat 51. 7 November 2016 Ahok diperiksa untuk kedua kalinya oleh polisi, pemeriksaan kali ini berdasarkan panggilan. Ahok diperiksa selama sembilan jam dengan 22 pertanyaan. Pada 15 November 2016 Kepolisian Republik Indonesia melakukan gelar perkara terbuka terbatas untuk menentukan status hukum Ahok. Sehari kemudian yaitu

16 November 2016, polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Pada 25 November 2016, Ahok menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Tanggal 2 Desember 2016, massa kembali melakukan Aksi Bela Islam jilid III dengan tuntutan agar Ahok segera ditahan. Sidang perdana kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama dilaksanakan pada 13 Desember 2016, dengan dakwaan pelanggaran pasal 156 a KUHP dan Pasal 156 KUHP. Sidang kedua berlangsung pada 20 Desember 2016. Setelah 19 kali persidangan, pada tanggal 20 April 2017 jaksa menuntut Ahok hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun. Ahok menyatakan akan mengajukan banding sehingga pada tanggal 25 April 2017, mantan Bupati Belitung Timur tersebut membacakan nota pembelaan berjudul “tetap melayani walau difitnah”. Tanggal 9 Mei 2017 hakim membacakan vonis 2 tahun penjara kepada Ahok atas kasus dugaan penistaan agama.